

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Cetakan ke-2. Jakarta; Kencana.

_____. 2017. *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang. Volume 1 Pemahaman Awal*. Edisi Pertama. Cetakan ke-7. Jakarta; Kencana.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2015. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan ke-3. Jakarta; Kencana.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta; Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021. *Petunjuk Teknis Kegiatan Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat dan Bahan Obat Dalam rangka peningkatan awareness dan koordinasi lintas sektor sebagai upaya pengendalian antimicrobial resistance (AMR) periode 2021-2024*. Jakarta; Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021. *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta; Badan POM.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Profil Statistik Kesehatan 2021*. Jakarta; Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Kesehatan 2016, survey Sosial dan Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan 2016*. Jakarta; Badan Pusat Statistik.

Balai POM di Gorontalo. 2021. *Laporan Tahunan 2020*. Gorontalo; Balai POM di Gorontalo.

Balai POM di Gorontalo. 2023. *Laporan Tahunan 2022*. Gorontalo; Balai POM di Gorontalo.

Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta; Prenada Media.



t.al. 2021. *Dimensi Hukum Pencegahan dan Penanggulangan coronavirus Disease (Covid-19)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Indar. 2022. *Kapita Selekta Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Irwansyah. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus disease (Covid-19)*. Jakarta; Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta; Kementerian Kesehatan RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jilid II. Edisi Ketiga. Jakarta; Toko Gunung Agung.
- Marihot Manulang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Cet. II. Bandung; Refika Aditama.
- Malayu Hasibuan. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasa, Pengertian dan Masalah*. Jakarta; PT Toko Gunung Agung.
- Maringan Masry Sibolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta; Ghalia.
- Maskawati, Andriani Misdar, dan Muji Iswanty. 2018. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta; Litera.
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta; Liberty.
- Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang; UMM Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung; Universitas Lampung.
- Paulus Effendi Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana Pranada Media Grup.



- M Hadjon et.al.. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet. -11. Yogyakarta; Gajahmada University Press.

- Prayudi Atmosudirjo. 2004. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Purbacaraka. 1987. *Perihal kaidah Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- Safri Nugraha. 2007. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta; BPHN.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Glora Madani Press.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung; PT. Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan ke-16. Depok; PT. Rajagrafindo Persada.
- Sondang P Siagian. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi ke-2. Cetakan ke-5. Yogyakarta; Liberty.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung; Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Bandung; Alfabeta.
- Syamsuni. 2006. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Cetakan I. Jakarta; Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- T. Hani Handoko. 1990. *Manajemen*. Edisi II. Yogyakarta; BPFE.
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. 2015. *Obat-Obat Penting*. Edisi 7. Cetakan pertama. Jakarta; PT Gramedia.
- Toha Sherman. 2011. *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum*. Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan HAM RI.
- Triwibowo. 2014. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta; Nuha Medika.
- Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek hukum Dalam Pengawasan Obat dan Makanan*. Yogyakarta; Rineka Cipta.
- Situmorang dan Jusuf Juhir. 1993. *Aspek hukum Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta; Rineka Cipta.



World Health Organization. 2004. *The World Medicines Situation*. WHO.

Tesis, Jurnal/ Karya Ilmiah lainnya

Bennadi D. 2013. *Self-medication: A current challenge*. J Basic Clin Pharm. 5(1).

Chaturvedi VP, Mathur AG dan Anand AC. 2012. *Rational drug use - As common as common sense?*. Med J Armed Forces. 68(3). India.

Desrina Shesha Annisa. 2020. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek. University of Bengkulu Law Journal. Vol. 05. No.1.

Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. putu H. S., & Suryawan, I. N. P. 2023. *Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak*. Jurnal Hukum Saraswati. 05(01),

Khalid, A., Sastro, M., dan Yusrizal. 2022. *Efektifitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Peredaran Obat Keras Di Kabupaten Aceh Utara*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 10(2). Aceh.

M. Rifqi Rokhman, et.al.. 2017. *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek*. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi. Volume 7. Nomor 2. Universitas Gajah Mada.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Volume 01. Nomor 01. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Miller, R., and Goodman C. 2016. *Performance of retail pharmacies in low- and middle-income Asian settings: a systematic review*. Health Policy and Planning. 31(7). Oxford University Press.

M Rusydi Ridha. 2017. *Efektifitas Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan di Indonesia*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ofori-Asenso R. and Agyeman AA. 2016. *Irrational Use of Medicines - A Summary of Key Concepts*. Pharmacy (Basel). 4(4)



Prayogo. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan lam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang doman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi

Indonesia. Volume 13. Nomor 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Saha S. and Hossain MT. 2017. *Evaluation of medicines dispensing pattern of private pharmacies in Rajshahi, Bangladesh*. BMC Health Service Research. 17(1).

Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8. No.3.

Sumber Internet

<https://www.kemkes.go.id/article/view/22091600003/pentingnya-penggunaan-obat-yang-aman-jadi-fokus-peringatan-hari-keselamatan-pasien-sedunia-2022.html>, diakses tanggal 2 Maret 2023

<https://dinkes.gorontaloprov.go.id/pantau-warung-dan-swalayan-dinkes-provinsi-himbau-masyarakat-cerdas-membeli-obat/>, diakses tanggal 07 September 2022

<https://health.kompas.com/read/2016/08/08/183000523/.Pasar.Bebas.Obat.dari.Kota.hingga.Des?page=all>, diakses tanggal 07 September 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19 diakses 19 Desember 2021

<https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses tanggal 03 september 2022

<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/08/08/peredaran-obat-tak-terkendali-lebih-dari-80-sarana-kefarmasian-menyalahi-aturan.html>, diakses tanggal 07 September 2022

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses tanggal 09 Agustus 2022

<https://www.alodokter.com/informasi-seputar-resep-dokter-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses tanggal 07 November 2022

Fidi Setiawan, Menata Ulang Penggolongan Obat di RUU Kesehatan Omnibus law, dimuat dalam <https://farmasetika.com/2023/03/23/menata-ulang-penggolongan-obat-di-ruu-omnibus-law-kesehatan/>, diakses tanggal 27 Maret 2023

Kementerian Kesehatan dan UNICEF, Laporan Kajian Cepat Kesehatan : Latar Belakang Layanan kesehatan esensial pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, Jakarta, 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-kajian-cepat-kesehatan>, diakses 16 Oktober 2022



Rifatul Hidayat, Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal, Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan, 2018, <https://unukase.ac.id/web/media/derajat-pelayanan-kesehatan-yang-optimal/#> diakses tanggal 7 November 2022

Victor Jusuf Sedubun, Pengawasan Preventif Sebagai Bentuk Pengujian Peraturan daerah, dimuat dalam <https://fh.unpatti.ac.id/pengawasan-preventif-sebagai-bentuk-pengujian-peraturan-daerah/> tanggal 13 Agustus 2014, diakses 26 September 2022

World Health Organization (WHO). WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard [Internet], <https://covid19.who.int.>, diakses 17 Oktober 2022

Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, sumber <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses tanggal 03 September 2022

Peraturan Perundang-undangan

Ordonasi Obat Keras (*Sterkwerkende Geneesmeddelen Ordonantie, Staatsblad 1949:419*)

Presiden RI, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta, 2023

Presiden RI, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta, 2009

Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*, Jakarta, 1998

Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta, 2009

Presiden RI, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta, 2017

Presiden RI, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Jakarta, 2017

Menteri Kesehatan RI, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mor 02395/A/SK/VIII/86 tentang tanda Khusus Obat Keras Daftar G*, Jakarta, 1986



Kesehatan RI, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta, 1990

- Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib daftar Obat Jadi*, Jakarta, 1993
- Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga Kefarmasian*, Jakarta, 2011
- Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta, 2016
- Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta, 2017
- Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan*, Jakarta, 2021
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta, 2023
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, Jakarta, 2021
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat*, Jakarta, 2020
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya*, Jakarta, 2022

